

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH
(Studi Kasus di BPKD Kabupaten Bireuen)**
*[The Influence of Financial Performance and Capital Expenditure Allocation on Government
Economic Growth (A Case Study at BPKD of Bireuen Regency)]*

Mutia Lena^{1*} & Jamaluddin Jamaluddin¹

¹ Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

*Corresponding author: Mutia Lena, email: mutialena390@gmail.com

Received | Augustus 26, 2025, Accepted | June 10, 2026, Published | June 25, 2026

ABSTRACT | In essence, regional financial performance and capital expenditure allocation significantly impact economic growth. Consequently, this study was conducted within the scope of Bireuen Regency. This is crucial for the implementation of regional autonomy, specifically regarding the optimization of local resource potential, fiscal independence, and the promotion of sustainable development. The study utilized secondary data—including Locally-Generated Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), capital expenditure allocations, and economic growth figures covering the 2019–2023 period, obtained from the Regional Financial Management Agency (BPKD) and BPS Bireuen. Multiple linear regression and correlation analyses were employed. The results indicate that: (1) economic growth in Bireuen Regency fluctuated, peaking at 17.45% in 2023 and reaching a low of 1.53% in 2020. (2) Regional financial performance contributed positively to economic growth; specifically, the effectiveness of Locally-Generated Revenue (PAD) was rated as good, although the level of fiscal independence remained low. (3) Capital expenditure allocation played a significant role, particularly in 2023, when an increase in such spending appeared to drive a surge in economic growth.

Keywords: regional financial performance, capital expenditure, economic growth, locally-generated revenue, regional autonomy.

ABSTRAK | Secara substansi, kinerja keuangan daerah dan alokasi belanja modal berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dilakukan riset dalam ruang lingkup Kabupaten Bireuen. Mengingat hal ini, penting dalam implementasi otonomi daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, kemandirian fiskal, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa PAD, DAU, DAK, alokasi belanja modal, dan data pertumbuhan ekonomi periode 2019–2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS Bireuen. Digunakan regresi linier berganda dan korelasi. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen bersifat fluktuatif, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,45% tahun 2023 dan terendah 1,53% pada tahun 2020. (2) Kinerja keuangan daerah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana efektivitas PAD tergolong baik, meskipun tingkat kemandirian fiskal masih rendah. (3) Alokasi belanja modal memiliki peran penting, khususnya tahun 2023 ketika peningkatannya diduga mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, PAD, otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan otonomi untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

memberi hak kepada daerah untuk menetapkan alokasi anggaran pada setiap jenis belanja. Penerapan otonomi daerah sejak 2001, didukung UU32 /2004 dan UU 33/2004, membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai peningkatan nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut, yang bertujuan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan dan peningkatan produksi barang serta jasa dalam suatu wilayah (daerah) selama periode tertentu. Hal ini mencerminkan naiknya nilai tambah ekonomi dan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal demi kesejahteraan yang lebih baik (Mahmudi *et al.*, 2022).

Simon Kuznets menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk menawarkan lebih banyak variasi barang ekonomi kepada penduduknya, dimana kapasitas ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, serta penyesuaian pada struktur kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (Slamet Wahyu Ferari, 2021 dalam Widia & Samsuddin, 2025).

Menurut N. Gregory Mankiw (2000) dalam Widia & Samsuddin (2025), PDRB mencerminkan keseluruhan aktivitas perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi membuka lapangan pekerjaan baru dan memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja demi meningkatkan faktor produksinya.

Pertumbuhan ekonomi daerah ini terkait erat dengan ketersediaan lapangan kerja, khususnya di sektor ekonomi produktif. Kinerja keuangan daerah berperan penting dalam proses ini, di mana rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta kemampuan daerah membiayai pembangunan dari sumber internal.

Pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan adil. Dan Akla (2019), menyatakan keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Langkah tersebut sebagai salah satu komitmen untuk menuju *good governance*.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan, yang juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kapasitas daerah dalam melaksanakan otonomi. Pengaturan pengelolaan keuangan diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang

mendorong inovasi kebijakan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemanfaatan dana transfer pusat.

PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. PAD menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan indikator kemandirian daerah. Optimalisasi PAD harus disertai peningkatan kualitas layanan publik dan menghindari beban berlebihan bagi masyarakat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan pada pemerintah pusat.

Selain PAD, terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN. DAU bertujuan pemerataan keuangan antar daerah, namun sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Sementara itu, DAK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan tertentu, terutama pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, dengan kewajiban daerah menyediakan dana pendamping minimal 10%. Kedua jenis dana ini menjadi penopang penting pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah juga tercermin dalam APBD, yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. APBD berfungsi tidak hanya sebagai rencana keuangan tetapi juga sebagai alat ukur kinerja keuangan. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi penggunaan anggaran yang rendah, serta pengelolaan keuangan yang kurang memadai (Suantha & Yanti, 2025).

Efektivitas pemungutan PAD dan efisiensi belanja menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan. Alokasi belanja modal memiliki peran strategis, terutama pada proyek-proyek publik seperti pembangunan infrastruktur, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dibandingkan belanja aparatur yang manfaatnya terbatas pada internal pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Bireuen. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam

mendorong kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang tepat menjadi kunci keberhasilan otonomi daerah.

LANDASAN TEORITIS

Pemerintah daerah memiliki tugas yang strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan layanan publik. Masih belum optimalnya kinerja finansial pemerintah dikarenakan beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi penggunaan, dan kualitas pengelolaan keuangannya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil (Purba, 2022).

Menurut Suantha & Yanti (2025), analisis kinerja keuangan APBD bertujuan untuk menilai keunggulan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah guna mencapai kemandirian dan meningkatkan pelayanan publik.

APBD berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan sosial. Indikator efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah sering digunakan sebagai dasar evaluasi.

Data pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode 2020 menunjukkan adanya penurunan konsumsi pemerintah dari 3,25% menjadi 1,94%. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun tersebut, sementara anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan sebagai respons terhadap penanganan pandemi di Indonesia (Suantha & Yanti, 2025).

Namun, pada tahun 2023, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja positif, tumbuh kuat dan stabil di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai sekitar 5,05%.

Kondisi diatas, hamper mirip terjadi di pemerintahan Kabupaten Bireuen. Dimana, pada tahun 2022, meskipun ekonomi tetap tumbuh positif di kabupaten Bireuen, laju pertumbuhan melambat menjadi 3,14%. Perlambatan ini bisa disebabkan oleh basis pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya (base effect), serta normalisasi dari berbagai program stimulus dan bantuan sosial yang sebelumnya diberikan secara intensif.

Sari (2016), menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah. Hal ini mencakup pengelolaan penerimaan dan belanja daerah, yang dilaksanakan berdasarkan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam suatu periode anggaran.

Menurut IAI (2015), kinerja keuangan mencerminkan potensi entitas dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dimilikinya. Dan Susanto (2019) yang menyatakan kondisi kesehatan keuangan suatu daerah dapat dievaluasi melalui analisis rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.

Penelitian Sularso & Restianto (2011) menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Kemudian, yang tak kalah penting tentang alokasi belanja modal. Salah satu komponen Belanja Langsung adalah Belanja Modal yang disamping langsung dirasakan oleh masyarakat juga memiliki manfaat jangka panjang. Belanja modal untuk pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

Alokasi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk pengadaan aset tetap dan infrastruktur yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan berbagai literatur, alokasi ini secara signifikan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013).

Alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan anggaran untuk perolehan aset tetap (seperti jalan, gedung, dan peralatan) akan meningkat-

kan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Penelitian (Sabir, 2016) menemukan alokasi belanja modal pada APBD memiliki efek positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Data Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen provinsi Aceh.

Data penelitian yang digunakan mungkin melibatkan laporan tahunan dari BPKD Kabupaten Bireuen serta data pertumbuhan ekonomi daerah selama beberapa tahun terakhir (2019-2023).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa PAD, DAU, DAK, alokasi belanja modal, dan data pertumbuhan ekonomi periode 2019–2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS Bireuen.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data pada penelitian ini adalah Analisis perhitungan kinerja keuangan yang didasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen

a). Tahun 2019

Dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bireuen tahun 2019 tercatat sebesar Rp12,887 miliar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp12,093 miliar.

Berdasarkan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen tahun 2019 terhadap 2018, sebesar:

$$\frac{PDRB_{2019}-PDRB_{2018}}{PDRB_{2018}} \times 100\% = \frac{12.887 - 12.093}{12.093} \times 100\% = 6,94\%$$

b). Tahun 2020

Tercatat bahwa nilai PDRB tahun 2020 adalah sebesar Rp13.084,00 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp12.887,00 miliar. Maka pertumbuhan ekonomi 2020 atas 2019, sebesar:

$$\frac{PDRB_{2020}-PDRB_{2019}}{PDRB_{2019}} \times 100\% = \frac{13.084,00 - 12.887,00}{12.887,00} \times 100\% = 1,53\%$$

c). Tahun 2021

Pada tahun 2021, Kabupaten Bireuen mencatatkan laju pertumbuhan bagus, berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. Dengan PDRB tahun 2021 sebesar Rp14.055,00 miliar, dan PDRB tahun 2020 sebesar Rp13.084,00 miliar, maka pertumbuhan ekonominya sebesar:

$$\frac{PDRB_{2021}-PDRB_{2020}}{PDRB_{2020}} \times 100\% = \frac{14.055,00 - 13.084,00}{13.084,00} \times 100\% = 7,42\%$$

d). Tahun 2022

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bireuen, total PDRB atas dasar harga konstan tahun 2022 mencapai Rp14.500,00 miliar, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp14.055,00 miliar. Maka pertumbuhan ekonomi 2022 atas 2021, sebesar:

$$\frac{PDRB_{2022}-PDRB_{2021}}{PDRB_{2021}} \times 100\% = \frac{14.500,00 - 14.055,00}{14.055,00} \times 100\% = 3,14\%$$

e). Tahun 2023

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bireuen, total PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 mencapai Rp17,030,00 miliar, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp14.500,00 miliar. Maka pertumbuhan ekonomi mencapai:

$$\frac{PDRB_{2023}-PDRB_{2022}}{PDRB_{2022}} \times 100\% = \frac{17.030,00 - 14.500,00}{14.500,00} \times 100\% = 17,45\%$$

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Di kabupaten Bireuen, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah sekitar 6,94%. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh peningkatan produksi di sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang menjadi penyumbang dominan terhadap struktur ekonomi daerah.

Pertumbuhan sebesar ini juga menjadi sinyal positif bahwa Bireuen memiliki potensi untuk terus mendorong

perkembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan, dengan catatan bahwa faktor-faktor pendukung seperti iklim investasi, infrastruktur, dan pengelolaan fiskal daerah dapat terus diperkuat.

Untuk 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelum-nya, yakni 1,53% dari tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun masih mencatatkan pertumbuhan positif, namun terjadi perlambatan signifikan. Penurunan laju pertumbuhan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020, menyebabkan kontraksi di berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan, jasa, dan pariwisata. Meskipun demikian, pertumbuhan yang tetap positif menunjukkan ketahanan sektor-sektor produktif lokal, khususnya pertanian dan sektor primer lainnya.

Sedangkan tahun 2021, Kabupaten Bireuen mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,42%, berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 1,53%.

Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa roda ekonomi daerah mulai bergerak lebih cepat setelah periode tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti perdagangan, jasa, dan konstruksi mulai menunjukkan pemulihan. Selain itu, stimulus fiskal dan bantuan pemerintah pusat melalui transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

Pada tahun 2022, meskipun ekonomi tetap tumbuh positif, laju pertumbuhan melambat menjadi 3,14%. Perlambatan ini bisa disebabkan oleh basis pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya (base effect), serta normalisasi dari berbagai program stimulus dan bantuan sosial yang sebelumnya diberikan secara intensif. Di sisi lain, kinerja sektor pertanian dan perdagangan tetap memberikan kontribusi positif, menjaga agar ekonomi tetap tumbuh meskipun lebih moderat.

Tahun 2023 menjadi titik puncak dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 17,45%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan signifikan ini berpotensi didorong oleh beberapa faktor utama:

peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah, terutama pada belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur dan proyek pembangunan, serta pulihnya sektor-sektor unggulan yang sebelumnya terdampak pandemi. Selain itu, peningkatan penerimaan daerah dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal, sebagaimana tercermin dalam perolehan opini WTP dari BPK, turut memperkuat kepercayaan investor dan pelaku ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, mencerminkan pengaruh faktor internal maupun eksternal terhadap aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan terhadap PDRB atas dasar harga konstan, dapat dilihat adanya pola yang mencerminkan dampak dari pandemi, proses pemulihan, dan dorongan fiskal yang cukup kuat pada tahun-tahun terakhir.

Maka dari hasil diatas, secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen menunjukkan kemampuan adaptif dan resilien dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta potensi besar untuk terus tumbuh apabila didukung oleh kebijakan fiskal yang sehat dan penguatan sektor produktif lokal. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang variatif ini sangat relevan untuk dianalisis lebih lanjut kaitannya dengan kinerja keuangan daerah serta alokasi belanja modal, guna melihat sejauh mana pengelolaan fiskal pemerintah daerah berpengaruh terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen menunjukkan tren fluktuatif, dengan capaian tertinggi sebesar 17,45% pada tahun 2023 dan capaian terendah sebesar 1,53% pada tahun 2020. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, serta kebijakan fiskal daerah yang mencakup pengelolaan keuangan dan belanja pembangunan.
- b) Kinerja keuangan daerah, terutama efektivitas PAD dan efisiensi pengelolaan anggaran, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selama periode penelitian, rasio efektivitas PAD tergolong baik (mencapai lebih dari 100% pada tahun 2022), namun rasio kemandirian fiskal masih rendah (<10%), yang menunjukkan perlunya penguatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar tidak bergantung pada dana transfer.

- c) Alokasi belanja modal menunjukkan tren yang belum optimal, karena porsi belanja modal terhadap total belanja daerah masih relatif kecil (berkisar antara 5–16%). Meski demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan alokasi belanja modal yang diduga turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi pemerintah daerah pada sektor produktif memiliki peran penting dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Saran

Berdasarkan hal diatas, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, yakni: (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), baik dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah maupun memperkuat sistem pemungutan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. (2) Alokasi belanja modal sebaiknya ditingkatkan secara proporsional dan strategis, terutama pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah, seperti infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ricardy Purba (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin, *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(4), 1004-1012, <http://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11905>
- Havid Sularso, Yanuar E. Restianto (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, *Media Riset Akuntansi* 1(2), 109-124, https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Kasan K. Suantha, Risma Yanti (2025). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 5(3), 125-134 <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.3935>
- Lufki Laila Nurhidayati & Rizal Yaya (2013). Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah, *JAAI* 17(2), 102-114
- Miftakul Akla (2019). Transparansi Keuangan Daerah Dalam Perspektif Islamic Good Governance, *Jurnal Muslim Heritage*. 4(1), 159-169
- M. Zulkarnain Erni Wiriani, Y. A. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Null*. <https://doi.o.Null>, 3(1).
- Relianty K. Mamudi, Daisy S.M Engka, Hanly F.Dj Siwu (2022). Analisis Komparatif Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Minahasa Dan Minahasa Selatan, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 22 No.3
- Rendy Armando Kakasih, G. M. V. K. S. Y. . T. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan DanaAlokasi Umum Terhadap Belanja Modal PadaKabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi UtaraPeriode 20019-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 124–134.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692
- Sabir (2016) Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013. *Doktor thesis*, Universitas Brawijaya.
- Shindi Widia, M Afdal Samsuddin (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3(3), 272-287 DOI: <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1571>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 81–92.